

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan keuangan daerah menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah bukan hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi juga perlu adanya dukungan dari kemampuan keuangan yang memadai. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan.

Menurut Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Masing masing pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Apabila pemerintah telah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya keuangan secara optimal maka pemerintah sudah bisa dikatakan mampu untuk menjalankan kewajiban. Kinerja keuangan pemerintah daerah tampak dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menjadi tolak ukur pemerintah daerah dalam mengukur kemampuannya untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan ini dapat terlihat dari ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah ketika membiayai kegiatan serta proyek daerah pada periode waktu tertentu.

Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus sebagai pengguna anggaran haruslah meningkatkan kinerja keuangannya menggunakan konsep *value for money* yang berarti konsep pengelolaan sector public yang berlandaskan pada tiga faktor utama yaitu, ekonomi, efisiensi, efektivitas. Dinas Pariwisata Kota Padang yang memegang sektor pariwisata di Kota Padang haruslah dapat meningkatkan pelayanan pada objek wisata Kota Padang sehingga dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan penerimaan dan kinerja pendapatan pada Dinas Pariwisata Kota Padang?
2. Bagaimana perkembangan kinerja belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang?

### 1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan dan kinerja pendapatan pada Dinas Pariwisata Kota Padang
2. Untuk mengetahui perkembangan kinerja belanja pada Dinas Pariwisata Kota Padang

### 1.4 Manfaat Magang

1. Untuk mendapatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa pada keterampilan praktek
2. Menambah pengetahuan serta informasi tentang pengelolaan keuangan pada Dinas Pariwisata Kota Padang
3. Sebagai sara dan aplikasi ilmu yang telah didapatkan pada perkuliahan dengan praktek lapangan

### 1.5 Metode Pengolahan Data

1. Studi Keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai referensi seperti buku teks dan bahan bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang di bahas oleh penulis.

2. Studi Lapangan

- a. Data Primer

Data yang didapat dari wawancara dengan pejabat dan karyawan instansi terkait.

- b. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

## **1.6 Tempat dan Waktu Magang**

Dalam menjalankan kegiatan magang penulis menetapkan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Januari sampai Maret 2022.

## **1.7 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dari perumusan masalah, penulis memandang bahwa pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan pada dinas pariwisata harus berdasarkan pada peraturan peundang undangan yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan pada dinas pariwisata kota padang.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari 8 sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruanglingkup pembahasan, dan sistemtika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini terdapat teori teori mengenai permasalahan yang menjadi objek dari penelitian, pengertian masing masing aspek serta memuat jawaban sementara dari rumusan masalah.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Merupakan profil lembaga yang meliputi latar belakang dari Dinas Pariwisata Kota Padang, tujuan, lokasi, status, dan struktur organisasi.

#### BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian lebih lanjut mengenai pembahasan yang didapatkan dari magang mengenai “ Analisis Karakteristik Belanja Pada Dinas Pariwisata Kota Padang”.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari analisis dari pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai suatu pertimbangan yang bertujuan untuk perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.



